

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada fitrahnya penciptaan manusia oleh Tuhan adalah sebagai makhluknya yang paling sempurna. Dikatakan sempurna karena setiap manusia dikaruniai akal pikiran yang tidak terdapat pada makhluk lainnya sehingga mampu membedakan suatu baik buruk dalam bertindak. Dalam penciptaan oleh Allah SWT, manusia dijadikan-Nya sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Tujuannya yakni agar antara laki-laki dengan perempuan dapat menghasilkan keturunan sebagai generasi penerus.

Perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari, mengakibatkan manusia dalam kehidupannya selalu berevolusi. Di dalam perkembangan tersebut memberikan dampak bagi kehidupan manusia yakni dampak positif dan dampak negatif. Ketaatan serta kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai sosial dan agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia semakin terkisis. Salah satunya dapat dilihat dari semakin banyaknya fenomena hubungan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya yang diantara keduanya belum terikat hubungan perkawinan. Perbuatan seperti itu di Indonesia dikenal dengan sebutan perzinaan.

Tanpa disadari perbuatan perzinaan seperti yang di atas tersebut dianggap hal lumrah pada masa sekarang ini terutama bagi remaja-remaja yang padahal perbuatan seperti itu akan membaya banyak dampak yang

negatif pula. Beberapa dampak yang akan timbul seperti: meningkatnya remaja yang hamil di luar nikah, meningkatnya tindak pidana aborsi, pernikahan dan perceraian usia dini, penelantaran anak, putusnya pendidikan, terjangkitnya penyakit kelamin, dikarenakan berganti-ganti pasangan, dan lain sebagainya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kehancuran akhlak serta merenggangkan ikatan nilai-nilai dan norma agama yang berakhir pada kebebasan tanpa adanya batasan jikalau dibiarkan berlangsung secara terus menerus.

Perkembangan zaman senantiasa membawa masyarakat kearah perubahan, sehingga hukum diperlukan sebagai rekayasa demi menciptakan masyarakat yang dicita-citakan oleh negara. Karena pada dasarnya hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban melainkan hukum juga diharapkan pula menjadi sebuah alat untuk mengubah kehidupan. Untuk pengwujudan hal tersebut haruslah didukung oleh lingkungan kehidupan yang kondusif, responsif serta memadai akan hukum, sehingga terciptanya kesesuaian dan keselaran untuk memaknai nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat menuju pada kondisi yang lebih baik.¹

Setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya memiliki aturan-aturan yang berbeda disesuaikan dengan kondisi serta latar belakang negara tersebut. Perbuatan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan di Indonesia merupakan hal yang dianggap melanggar norma

¹ Didiek R. Mawardi, Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No 3, Juli 2015, Hal 277

yang hidup di dalam masyarakat serta merupakan hal yang menyimpang. Hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan kekacauan terhadap individu maupun masyarakat. Ketika ada hal seperti itu hukum ada untuk mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang pengaturan tentang perzinaan termuat dalam Pasal 284 KUHP. Adapun bunyi Pasal 284 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:
 - 1a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - 2a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin,
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dala sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak dindahkan selama perkawinan selama belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Berdasarkan Pasal di atas ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dijerat dengan Pasal 284 KUHP apabila laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan serta salah satu ataupun kedua-duanya diantara mereka terikat kedalam perkawinan dengan orang lain (Pasal 27 BW) serta dalam terjadinya persetubuhan tersebut didasarkan dengan kesukarelaan oleh kedua pihak. Dengan kata lain tindak pidana perzinaan atau overspel Pasal 284 KUHP adalah tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Pasal 284 KUHP adalah delik aduan, yakni delik yang hanyadapat dilakukan penuntutan dikarenakan adanya pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar.

Pasal 284 KUHP memberikan penjelasan perbuatan yang disebut sebagai perzinaan. Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian perzinaan yang dipandang oleh masyarakat Indonesia selama ini. Masyarakat berpemahaman bahawa setiap laki-laki dengan perempuan yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan baik salah satu ataupun kedua-duanya diantara mereka telah terikat perkawinan dengan orang lain atau bahkan juga termasuk perzinaan menurut pandangan masyarakat jikalau keduanya diantara mereka tidak terikat kedalam hubungan perkawinan dengan orang lain, dikatakan telah melakukan perzinaan.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online membrikan pergertian zina yakni, pertama perbuatan bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan kedua perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang

terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Jika diamati dengan saksama dalam pasal 284 KUHP ini memberikan peluang yang sangat besar bagi laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan untuk melakukan persetubuhan tetapi tidak dapat dijerat dengan delik perzinaan ini. Sedangkan di sisi lain perbuatan seperti itu merupakan suatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar norma baik norma sosial, agama, maupun budaya yang hidup dalam masyarakat.

Pengaturan terhadap hukum di Indonesia senantiasa dilakukan perubahan demi menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa KUHP ini merupakan produk hukum peninggalan zaman kolonial Belanda. Banyak dari pasal-pasal KUHP yang dianggap tidak sesuai dengan nilai luhur serta permasalahan kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan KUHP dianggap perlu untuk dilakukan pembaharuan dari pasal-pasal yang ada di dalamnya. Mengingat lagi KUHP ini merupakan sudah terbilang berlangsung lama.

Indonesia selalu berupaya melakukan perubahan-perubahan terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakatnya agar menyesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakatnya. Pada akhir masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019,

mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dapat disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satunya ada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun pengajuan RKUHP tersebut mendapat sorotan dari masyarakat terutama kalangan mahasiswa.

Terdapat beberapa pasal yang dianggap kontroversial di dalam RKUHP tersebut sehingga menyebabkan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah di depan gedung DPR. Adapun pasal-pasal yang dianggap kontroversial tersebut salah satunya terdapat pasal untuk menjerat tindak pidana perzinaan. Dibawah ini merupakan bunyi pasal dari tindak pidana perzinaan dalam RKUHP 2019.

Pasal 417 RKUHP:

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau isterinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orangtua, atau anaknya.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 418 RKUHP:

- (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, isteri, orang tua atau anaknya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dijatuhkan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, isteri, orang tua, atau anaknya.
- (4) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan pasal 25, pasal 26, dan pasal 30.
- (5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 419 RKUHP

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau sepihak derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Dari pasal perzinahan RKUHP di atas terdapat perluasan tindak jika dibandingkan dengan Pasal 284 KUHP. Jika diperhatikan perluasan terhadap konsep atau rancangan tindak pidana perzinahan di dalam RKUHP jikalau diberlakukan akan sejalan dengan nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa perbuatan antara laki-laki dengan perempuan yang melakukan persetubuhan walaupun salah satu atau kedua-duanya diantara mereka tidak terikat dalam ikatan perkawinan

dengan orang lain, dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang menyimpang dan bercela sehingga dapat merusak moral bangsa. Namun, dari Pasal perzinaan dalam RKUHP tersebut menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat, dalam artian bahwa pasal tersebut belum seutuhnya dapat diterima atau disepakati oleh seluruh masyarakat.

Adapun dampak lainnya jikalau pasal tindak pidana perzinaan di dalam RKUHP 2019 diberlakukan maka akan dimungkinkan meminimalisasikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari perzinaan yang terjadi belakangan remaja seperti yang marak terjadi saat ini, namun disisi lain konsep atau rancangan tersebut dinilai terlalu masuk dan mencampuri dalam urusan pribadi setiap individu masyarakat, juga akan menyebabkan terjadinya overkriminalisasi.

Masyarakat belum mencapai kesepakatan untuk konsep atau rancangan pasal perzinaan dalam RKUHP 2019. Oleh karena itulah pembentuk undang-undang dalam melakukan pembaharuan terhadap konsep pasal perzinaan patut dikaji dengan kehati-hatian. Bagaimanakah akibatnya jika suatu perbuatan dijadikan sebagai tindak pidana tetapi ada sebagian dari masyarakat yang menilai perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tidak dapat dijadikan tindak pidana.

Permasalahan-permasalahan terkait hukum dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk membangun tatanan hukum yang baru, tidaklah dapat dilakukan pengkajian secara terpisah dengan konteks sosialnya. Bisa dikatakan berbagai perubahan yang terjadi dalam

masyarakat akan memberikan beban tersendiri terhadap hukum, dengan demikian hukum dituntut untuk meningkatkan kepekaan dalam menghadapi situasi tersebut.²

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik memilih judul penelitian: **STUDI PERBANDINGAN KONSEP TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM KUHP DAN RKUHP 2019**

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari pemaparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan konsep tindak pidana perzinaan menurut KUHP dan RKUHP Tahun 2019?
2. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan konsep tindak pidana perzinaan menurut KUHP dan RKUHP 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep tindak pidana perzinaan menurut KUHP dan RKUHP Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan konsep tindak pidana perzinaan menurut KUHP dan RKUHP 2019.

² Ellya Rosana, Hukum Dan Perkembangan Masyarakat, Jurnal TAPIs Vol.9 No.1 Januari-Juni 2013, Hal 114

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat dalam dunia pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini penulis berharap mampu menjadi bahan rujukan, informasi, atau perbandingan untuk mereka yang berminat meneliti perbandingan tindak pidana perzinaan menurut KUHP dan RKUHP Tahun 2019.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini penulis berharap mampu menjadi bahan masukan informasi, untuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam melakukan penelitian hukum terutama penegakan hukum dalam melakukan perbandingan tindak pidana perzinaan menurut KUHP dan pasal RKUHP Tahun 2019.

E. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama mengenai perbandingan tindak pidana perzinaan menurut KUHP dan RKUHP Tahun 2019.

2. Bagi pemerintah

Panelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, sumbangan pemikiran serta kontribusi bagi pemerintah untuk berkembangnya hukum yang lebih baik.

3. Bagi masyarakat

Panelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman bagi seluruh masyarakat mengenai perbandingan tindak pidana perzinaan menurut KUHP dan pasal RKUHP Tahun 2019.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Objek yang akan dikaji dalam penelitian yakni Perbandingan Konsep Tindak Pidana Perzinaan Dalam KUHP Dan RKUHP 2019 Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif. Metode penelitian normatif yakni suatu prosedur penelitian ilmiah guna menemukan kebenaran yang berasalkan dari logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.³

Dalam penelitian ini penulis menggabungkan dua pendekatan normatif yakni antara pendekatan perundang-undangan dengan

³ Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Cetakan Keempat 2008, Hal 57

pendekatan konsep. Penelitian normatif tentunya menggunakan pendekatan perundang-undangan, diakrenakan yang hendak diteliti yakni bergabai aturan hukum yang menjadi tema dalam penelitian. Sedangkan pendekatan konsep memiliki banyak pengertian. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang particular.⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang hendak digunakan dalam penelitian oleh penulis terdiri dri tiga sumber yakni, sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah merupakan terdiri dari aturan hukum yang terkait dengan pengaturan perzinaan dalam hal ini penulis mengacu kepada KUHP dan RKUHP.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, serta kasus-kasus huku yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun memberikan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan lain-lain.⁵

⁴ *Ibid*, Hal 306

⁵ *Ibid*, Hal 392

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan. Mencari bahan-bahan ataupun data guna melengkapi keperluan penulis melalui kepustakaan dengan cara membaca, menafsirkan buku ataupun literature lainnya yang dianggap sebagai pendukung.

4. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, serta literature lainnya yang dimaksud penulis uraikan serta hubungkan, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.⁶

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar atau alasan penulis untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas, serta terdapat permasalahan, tujuan dan manfaat, kegunaan, metode, dan sistematika penulisan.

⁶ *Ibid*, Hal 393

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi uraian mengenai teori-teori yang diharapkan mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian baik dari buku-buku maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian serta pembahasan dari analisa hasil pengolahan data yang menghubungkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan.

